

HARIAN
UNTUK UMUM

TERBIT SEJAK
01 MARET 2011

PENDIRI:
Ardi, S.Si, Apt

Edisi Khusus

BUTON, BUTENG, BUSEL, BUTUR, WAKATOBI, MUNA, MUBAR, KOLAKA
BOMBANA, KENDARI, BAUBAU

Baubau Post

Baubaupost.com

KORAN NOMOR SATU DI KEPULAUAN BUTON

Minggu
17 November 2024

Eceran Rp 5000

Berlangganan Rp 100.000/ bulan

Info Langganan dan Iklan HP/WA: 082160543989

La Ode Aswad: APIP Baubau Harus Bisa Cegah Korupsi dan Perjudian



Pj Sekda Kota Baubau La Ode Aswad, S.Sos, M.Si saat mewakili Pj Wali Kota Baubau pada kegiatan sosialisasi pencegahan korupsi di Arkana Jumat (15/11/2024)

Laporan: Ardi, Baubau Post, Durasi Times

BAUBAU, BP-Pj Sekda Kota Baubau La Ode Aswad, S.Sos, M.Si saat mewakili Pj Wali Kota Baubau pada kegiatan sosialisasi pencegahan korupsi di Arkana Jumat (15/11/2024) mengingatkan kepada Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dalam hal ini Inspektorat Daerah Kota Baubau agar senantiasa melakukan pencegahan terhadap praktek korupsi dan perjudian serta memastikan penghematan keuangan negara.

Saber Pungli Lingkup Pemkot Baubau Disosialisasikan



Laporan: Hengky TA
BAUBAU, BP-Kegiatan Sosialisasi Sapu Bersih Pungutan Liar

(SABER PUNGLI) di lingkup Pemkot Baubau dilaksanakan pada Kamis (14/11/2024). Pj Wali Kota Baubau Dr H Muh Rasman Manafi, SP, M.Si mengungkapkan, Inspe-

Lanjutan ke Hal: 7

Menurut La Ode Aswad, ada 7 fokus prioritas APIP yakni pertama agar APIP mengantisipasi fraud dan penyimpangan dengan meningkatkan kemampuan dalam mengantisipasi berbagai potensi kecurangan dan penyimpangan yang dapat merugikan keuangan negara/daerah. Kedua, deteksi dini melalui

Lanjutan ke Hal: 7

Pj. Bupati Buton La Haruna Sambut Kedatangan Kepala BPKP Sultra

Pewarta: Lisna

BUTON, BP-Penjabat (Pj.) Bupati Buton, La Haruna, S.P., M.Si., menyambut kedatangan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulawesi Tenggara, Harry Sowo, Ak., M.E., di Aula Kantor Bupati Buton. Kunjungan tersebut berlangsung

Lanjutan ke Hal: 7

HKN ke 60, Pemkab Buteng Lakukan Beragam Kegiatan Pola Hidup Sehat, Pj Bupati Buteng Kostantinus Beri Apresiasi



Laporan: Ardi

Dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-60, Pemkab Buton Tengah

melalui Dinas Kesehatan menggelar berbagai kegiatan di halaman eks kantor Bupati, Jumat

Lanjutan ke Hal: 7

Penyebab Kecelakaan Tol Cipularang KM92: Gagal Fungsi Rem Truk Trailer



penyebab kecelakaan beruntun di Tol Cipularang akibat kegagalan fungsi rem pada truk trailer.

Laporan: Hamid

JAKARTA-Polisi menyebut penyebab kecelakaan beruntun di Tol Cipularang pada Senin

(11/11) akibat kegagalan fungsi rem pada truk trailer. Sopir truk berinisial R pun ditetapkan se-

Lanjutan ke Hal: 7



Kepala BPKP Sultra Kunjungi Buton

SEGENAP PIMPINAN, REDAKSI, & KARYAWAN PT FAREN GRAFIKA

PENERBIT SURAT KABAR HARIAN (SKH) BAUBAU POST (www.baubaupost.com)

Mengucapkan :

Terimakasih Kepada Dewan Pers Yang Telah Menetapkan SKH Baubau Post

(www.baubaupost.com) Sebagai Media Terverifikasi per Tanggal 30 Desember 2022



Andina Latief, SKM
DIREKTUR



La Ode Aswad: APIP Baubau Harus Bisa Cegah Korupsi dan Perjudian

sistem peringatan dini early warning sistem sebagai bentuk pencegahan awal. Ketiga, APIP sebagai role model integritas, sebagai contoh integritas dan quality assurance dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Keempat, tidak boleh ada ruang terhadap segala bentuk korupsi, kokusi dan nepotisme (KKN). Kelima, Indeks integritas pemerintah diharapkan terus meningkat, mencerminkan kualitas tata kelola yang semakin baik. Keenam,

tingkatkan pengawasan pada layanan publik, administrasi keuangan, disiplin pegawai dan pencapaian "zero mistake" dalam administrasi keuangan. Serta ketujuh, terobosan kreatif dalam penguatan moralitas dan etika pegawai, melalui inovasi untuk menghadapi tantangan, termasuk dalam meningkatkan moralitas dan etika pegawai pemerintahan.

Dijelaskan La Ode Aswad, Pemerintah daerah harus dapat membangun tata kelola pemer-

intahan yang baik dan bersih. APIP sebagai internal auditor pemerintah harus dapat mendorong efektivitas implementasi sistem pengendalian intern yang handal di seluruh tahapan pengelolaan keuangan daerah serta mampu membangun early warning system untuk mendeteksi kecurangan dan mengendalikan resiko yang terjadi. Dalam hal ini komisi pemberantasan korupsi telah membuat aplikasi jagaid yang didalamnya

terdapat monitoring center prevention (MCP).

"Kegiatan ini sangat penting mengingat korupsi merupakan masalah yang dapat mempengaruhi jalannya roda pemerintahan yang ada di daerah, dimana bertentangan dengan amanah dalam uud 1945 dan cita-cita bersama yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah yang pada akhirnya akan mendorong terwujudnya negara yang sejahtera," jelasnya.*

Saber Pungli Lingkup Pemkot Baubau Disosialisasikan

ktorat Kota Baubau yang menyelenggarakan sosialisasi tentu ada fokus yang ingin dicapai setidaknya pertama mengantisipasi penyimpangan dari kegiatan-kegiatan yang mungkin ada potensi kecurangan. Kemudian, yang kedua itu juga lebih efisien jika ada agenda efektif kedepan perencanaan lebih bagus bersama dengan tim.

"Yang dapat kita peroleh dari kegiatan-kegiatan yang bisa berakibat pada penyimpanan kemudian juga yang menjadi role model dalam membangun integritas or-

ganisasi saya kira ini yang perlu dan penting," ujarnya.

Dr H Muh Rasman Manafi menambahkan, Inspektorat sebagai organisasi pengawal kebijakan yang mungkin bisa bertentangan dengan aturan tertentu harus lebih kompeten dari OPD - OPD lain yang selalu menyampaikan laporan setiap akhir bulan. Bahwa kalau bicara bersih-bersih di birokrasi maka yang pertama harus bersih adalah Inspektorat dalam pencegahan KKN.

Orang nomor satu di Kota Baubau ini

mengatakan, kalau berbicara pungutan liar maka sudah memiliki kesamaan bahwa bersepakat memberantas pungutan liar termasuk juga tim yang sudah dibentuk. Semuanya akan memberikan apa-apa saja yang menjadi rambu-rambu dan yang bisa dilakukan termasuk koordinasi dengan sektor yang menanganinya.

Lebih lanjut dijelaskan, Pemkot Baubau berupaya terus menekan agar jangan terjadi pungutan liar sebab kalau berbicara pungutan liar pasti sangat mempengaruhi terutama di ta-

taran sosial.

"Saya selalu ingatkan harus selalu kita lakukan dan tanpa bosan kita lakukan untuk tidak melakukan pungutan liar. Sekilas saya angkat sedikit bapak Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran program prioritas yang sudah di sosialisasikan kemana-mana melihat visi misi presiden kita itu sangat tegas dinarasikan bahwa memperkuat reformasi birokrasi politik yang unggul tentang memperkuat pemberantasan dan pencegahan korupsi dan narkoba," jelasnya.*

Pj. Bupati Buton La Haruna Sambut Kedatangan Kepala BPKP Sultra

dalam rangka rapat pembinaan kontekstual Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Sektor Perikanan Tahun 2024, Jumat, 15 November 2024.

Dalam sambutannya, La Haruna menyampaikan apresiasi atas kehadiran Harry Sowo dan rombong-

gan. "Selamat datang, Bapak Kepala Perwakilan BPKP Sultra, di Kabupaten Buton. Semoga kehadiran Bapak dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Buton," ucapnya. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi dalam mem-

perkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Rapat pembinaan SPIP terintegrasi ini merupakan langkah strategis untuk mendukung pengelolaan sektor perikanan yang lebih

baik di Kabupaten Buton. Sebagai daerah yang memiliki potensi besar di

sektor perikanan, implementasi SPIP yang terintegrasi diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan serta mengurangi risiko penyimpangan dalam pelaksanaan program.

Kepala Perwakilan BPKP Sultra, Harry Sowo, dalam paparannya

HKN ke 60, Pemkab Buteng Lakukan Beragam Kegiatan Pola Hidup Sehat, Pj Bupati Buteng Kostantinus Beri Apresiasi



(15/11/2024).

Acara ini diawali dengan senam bersama yang diikuti oleh Pj Bupati Buton Tengah, Kostantinus Bukide, para kepala OPD, staf puskesmas, dan masyarakat sekitar. Kegiatan ini berlangsung dengan penuh semangat sebagai bentuk kampanye hidup sehat.

Setelah senam, dilanjutkan dengan kegiatan skrining kesehatan yang dilakukan oleh para dokter dan tenaga medis dari puskesmas di wilayah Buton Tengah. Skrining

tersebut mencakup pemeriksaan tekanan darah, gula darah, dan konsultasi kesehatan, dengan tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya deteksi dini terhadap penyakit.

Dalam kesempatan tersebut Pj Bupati Buton Tengah, Kostantinus Bukide, menyampaikan apresiasinya kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam menyukseskan acara ini.

"Peringatan Hari Kesehatan Nasional ini menjadi momentum bagi kita semua un-

tuk terus meningkatkan pola hidup sehat, menjaga kebersihan lingkungan, dan mendukung program kesehatan pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat Buton Tengah", ungkapnya.

Kegiatan ini mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat, yang memanfaatkan layanan skrining kesehatan gratis serta menjadikan acara ini sebagai momen kebersamaan antara pemerintah dan warga dalam menciptakan Buton Tengah yang sehat.*

Penyebab Kecelakaan Tol Cipularang KM92: Gagal Fungsi Rem Truk Trailer

bagai tersangka.

Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Jules Abraham mengatakan telah melakukan penyelidikan berikutan olah TKP menggunakan metode TAA (traffic accident analysis) dan ram check kendaraan.

"Pemeriksaan ahli maupun saksi-saksi serta hasil olah TKP dengan TAA dan ram check kendaraan, maka telah dapat disimpulkan kecelakaan tersebut karena kegagalan fungsi rem pada kendaraan truk trailer," kata Jules dalam sebuah konferensi pers.

Dari hasil olah TKP, ditemukan

bekas rem yang dicurigai bekas rem truk trailer berada 200 meter sebelum titik tabrak. Panjang bekas rem 30 meter.

Kemudian hasil ram check menunjukkan tidak ada kebocoran angin pada sistem rem sehingga disimpulkan rem dalam kondisi baik sebelum kecelakaan.

Jules menambahkan jarak kampas rem dengan tromol pada bagian roda sebelah kiri 0,70 mm, sedangkan di sebelah kanan belum dapat diperiksa karena saat evakuasi sudah dalam perubahan.

"Ada indikasi kampas rem ter-

lalu panas, karena berubah warna, kompresor bersih dalam kondisi baik," katanya.

Dalam peristiwa ini, sopir trailer R ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis (14/11). Jules menyebut R mengendarai kendaraan dengan tidak wajar. Selain itu dia juga tidak mematuhi rambu peringatan untuk mengantisipasi kecepatan dan jarak pengereman.

"[R] diduga melanggar Pasal 311 ayat 5 UU Lalu Lintas Angkutan Jalan dengan ancaman 12 tahun penjara atau denda paling banyak Rp24 juta," kata Jules.*

menyampaikan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan BPKP dalam penerapan

SPIP. Ia berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat nyata bagi pengelolaan sektor

perikanan di Buton serta menjadi contoh bagi daerah lain di Sulawesi Tenggara.*

Profil 10 Capim dan Calon Dewas KPK yang Disetor Pansel ke Jokowi

Laporan: Hasim

JAKARTA - Panitia seleksi (pansel) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyeret masing-masing sepuluh nama calon pimpinan KPK dan calon dewan pengawas KPK untuk periode 2024-2029 kepada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada Selasa (1/10) lalu.

Selanjutnya, presiden akan memberikan daftar tersebut kepada DPR untuk melalui uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) guna dipilih masing-masing lima orang untuk memegang jabatan pimpinan KPK dan Dewas KPK.

Dari para capim KPK dan calon dewas KPK itu beberapa di antaranya ada yang memiliki latar belakang aparat penegak hukum baik dari kepolisian, kejaksaan, hingga advokat.

Berikut Profil Calon Pimpinan KPK:

Setyo Budiyo

Komjen Pol Setyo Budiyo adalah mantan Kapolda Sulawesi Utara yang menggantikan Irjen Mulyatno. Saat ini, Setyo menjabat sebagai perwira tinggi di Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri dan ditugaskan di Kementerian Pertanian, di mana dirinya naik pangkat menjadi Komisaris Jenderal (bintang tiga).

Setyo juga pernah menjabat sebagai Koordinator Supervisi Penindak (Korsupdak) di Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Karier Setyo di Korps Bhayangkara di antaranya pernah menjadi Kasat Tipikor Ditreskrim Polda Lampung dan Kasat Tipikor Polda Papua. Dia juga pernah menjadi i Wadirreskrim Polda Papua dan Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Papua.

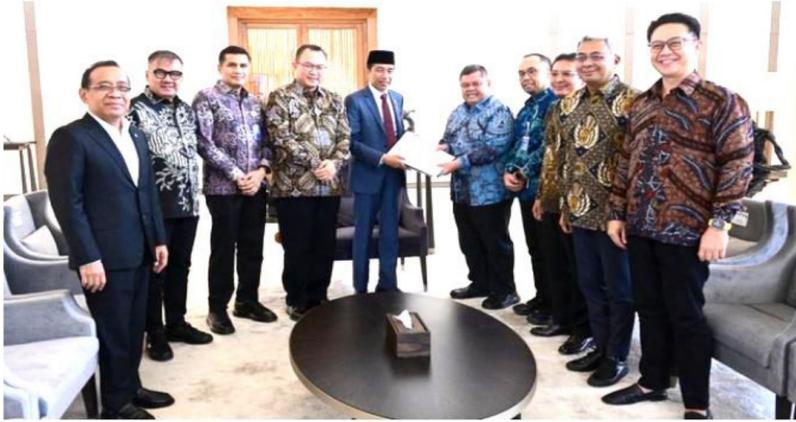
Djoko Poerwanto

Irjen Pol Djoko Poerwanto merupakan pejabat kepolisian berpangkat Inspektur Jenderal (bintang dua) yang saat ini sedang menjabat Kapolda Kalimantan Tengah sejak 2023.

Seperti Setyo, Djoko juga diketahui pernah pula bertugas sebagai penyidik di KPK.

Sepanjang kariernya di Korps Bhayangkara, Djoko juga pernah menjabat sebagai Kapolda Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Kasubdit II Tipikor Bareskrim.

Terkait jabatan di kepolisian, namanya sempat menjadi sorotan Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) karena beberapa kebijakan dan tindakan, seperti penerbitan maklumat tentang larangan demonstrasi di muka umum saat menjabat



Presiden Joko Widodo telah menerima nama-nama calon pimpinan (capim) dan calon dewan pengawas (dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang lolos hingga tahap wawancara dari panitia seleksi (pansel) KPK

Kapolda NTB pada Mei 2022, serta dianggap tidak patuh dalam melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Poengky Indarti

Poengky Indarti merupakan anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kopmolnas) periode 2020-2024. Dia juga anggota Kompolnas pada periode 2016-2020.

Perempuan yang juga advokat ini memulai kariernya di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya pada 1993 hingga 2000, di mana dirinya menjabat sebagai Wakil Direktur Bidang Operasional.

Poengky juga dikenal sebagai pengacara yang sering mengangkat isu-isu penindasan masyarakat di Surabaya. Kemudian, dirinya melanjutkan karier di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) di Jakarta pada tahun 2000. Dia juga menjadi salah satu pendiri dari lembaga Imparsial yang fokus pada persoalan hak-hak asasi manusia.

Ida Budhiati

Ida Budhiati adalah mantan anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang menjabat sejak 2012 di bawah kepemimpinan Profesor Jimly Asshiddiqie, dimana Ida memiliki peran dalam menjatuhkan sanksi serta menegakkan aturan etik terhadap penyelenggara pemilu.

Ida juga pernah menjadi komisioner KPUJateng dari 2003 sampai 2012, dan KPURI pada periode 2012-2017. Selain itu, dirinya pernah ikut dalam seleksi hakim Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2019.

Perempuan ini juga dikenal berlatar belakang advokat, di mana pada masa dasawarsa 1990an hingga medio 2000an dia pernah aktif di LBH Semarang dan juga LBHAPIK.

Johanis Tanak

Johanis Tanak adalah Wakil Ketua KPKpetahana. Dia masuk ke kursi pimpinan KPK menggantikan Lili Pintauli Siregar

yang mengundurkan diri di tengah pengusutan kasus etik oleh DewasKPK.

Johanis Tanak berlatar belakang sebagai jaksa. Sepanjang kariernya di Korps Adhyaksa tercatat pernah menjabat sebagai Direktur Tata Usaha Negara di Kejaksaan Agung RI dan Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi.

Sebagai Komisioner KPK, Johanis Tanak pernah tersandung dugaan pelanggaran etik terkait hubungannya dengan eks Plh Dirjen Minerba. Namun, akhirnya dinyatakan tidak terbukti oleh Dewan Pengawas KPK.

Fitroh Rohcahyanto

Fitroh Rohcahyanto merupakan seorang jaksa yang pernah menjadi Direktur Penuntutan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia telah menjabat di KPK selama lebih dari 11 tahun sebelum kembali ke Kejaksaan Agung pada 2023 lalu.

Fitroh dikenal sebagai jaksa dalam berbagai kasus korupsi besar, termasuk kasus korupsi proyek e-KTP dan kasus pembanguan Pusat Pendidikan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang.

Fitroh juga sempat menjadi sorotan publik setelah mundur dari jabatannya di tengah kontroversi pengusutan kasus Formula E, dengan alasan tidak ingin terlibat dalam skenario yang ditetapkan pimpinan KPK

Ibnu Basuki Widodo

Ibnu Basuki Widodo adalah hakim di Pengadilan Tinggi Manado yang sebelumnya pernah bertugas di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan menjadi pejabat Humas Pengadilan Tipikor Jakarta.

Sepak terjangnya di meja hijau, Ibnu beberapa kali menarik perhatian publik lantaran pernah memvonis bebas terdakwa korupsi pengadaan alat laboratorium IPA MTs di Kementerian Agama pada 2010.

Selain itu, saat menjabat sebagai Humas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Desember 2017, ia

pernah melarang jurnalis untuk meliput persidangan kasus korupsi e-KTP dengan terdakwa Setya Novanto.

Agus Joko Pramono

Agus Joko Pramono dikenal sebagai mantan Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2019-2023. Perjalanan kariernya, Agus pernah menjabat sebagai Komite Penasihat Pemeriksaan Independen (IAAC), anggota Inisiatif Pengembangan INTOSAI (IDI), dan anggota BPK periode 2013-2019.

Agus juga merupakan guru besar akuntansi publik di Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED) dan saat ini dia tercatat sebagai komisaris di PT Pertamina Hulu Energi.

Lepas dari BPK pada 2023 lalu, Agus sempat terlibat dalam isu dugaan transaksi mencurigakan sebesar Rp115 miliar di Kebumen, Jawa Tengah, yang membuat namanya menjadi sorotan publik. Terlebih dengan adanya karangan bunga bertuliskan sindiran yang dikirimkannya saat agenda serah terima jabatan Wakil Ketua BPK dari dirinya.

Saat diwawancarai wartawan pada 2023 lalu, Agus membantah tuduhan tersebut dan menyatakan bahwa tidak pernah ada pemeriksaan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait dirinya. Dirinya menilai bahwa hal tersebut adalah upaya pendiskreditan namanya.

Michael Rolandi Cesnanta Brata

Michael Rolandi Cesnanta Brata adalah mantan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Michael sempat menjadi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank DKI dan saat ini menjabat sebagai Komisaris PT Bank DKI sejak Desember 2022.

Michael juga pernah dihadirkan sebagai saksi oleh Jaksa KPK dalam sidang kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di

Prabowo Tunjuk Komjen Purn Andap Jadi Staf Ahli Bidang Polkam Kemenkum



Prabowo menunjuk Komjen Pol (Purn) Andap Budhi Revianto sebagai Staf Ahli Bidang Politik dan Keamanan Kementerian Hukum (Kemenkum).

Laporan: Husni

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menunjuk Komjen Pol (Purn) Andap Budhi Revianto sebagai Staf Ahli Bidang Politik dan Keamanan Kementerian Hukum (Kemenkum).

Hal itu diketahui dari siaran pers Kemenkum yang pada hari ini melaksanakan pelantikan terhadap 11 pejabat eselon I baru.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan pelantikan tersebut guna mewujudkan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI, tepatnya pada poin ketujuh yang berfokus pada penguatan reformasi politik, hukum dan birokrasi serta pencegahan dan pemberantasan korupsi.

“Upaya (pelantikan) ini bertujuan untuk mewujudkan supremasi hukum yang transparan dan adil” ujar Supratman dalam acara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Hukum, di Graha Pengayoman, Jakarta, Jumat (15/11).

Munjul, Pondok Rangun, Jakarta Timur, yang melibatkan mantan Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Yoory Corneles. Hal ini menjadi sorotan publik lantaran dirinya yang merupakan mantan Kepala Inspektorat Pemprov DKI sempat dicecar Jaksa KPK terkait Peraturan Gubernur (Per-gub) DKI Jakarta Nomor 51 Tahun 2019.

Ahmad Alamsyah Saragih

Supratman memberi pesan kepada pejabat baru tersebut untuk bekerja maksimal. “Jabatan dan kekuasaan pasti berakhir, entah kita ikhlas atau tidak. Kekuasaan itu akan kita tinggalkan. Oleh karena itu, mari kita buat bersama yang terbaik bagi bangsa dan negara,” tutur dia.

Ia turut menekankan lima poin yang perlu dipedomani oleh para pejabat di Kemenkum. Yakni integritas dan akuntabilitas, mendukung reformasi birokrasi, mengembangkan kompetensi dan profesionalisme, memperkuat sinergi antarkementerian, serta memberikan keteladanan dan semangat.

Berdasarkan salinan Keputusan Presiden RI Nomor 169/TPA Tahun 2024, beberapa pejabat Kementerian Hukum dan HAM kembali diberikan kepercayaan untuk mengisi posisi pimpinan tinggi madya di Kementerian Hukum.

Di antaranya Komjen Pol Nico Afinta sebagai Sekretaris Jenderal Kemenkum, Dhahana Pu-

Ahmad Alamsyah Saragih pernah menjabat sebagai anggota Ombudsman RI periode 2016-2020 dan Ketua Komisi Informasi Pusat RI periode 2009-2013.

Setelah tidak lagi menjabat di Ombudsman, Alamsyah ikut mendirikan PT Tera Binar Persada (Tera Indonesia Consulting) yang bergerak dalam bidang pelatihan hingga pengembangan teknologi untuk badan publik, baik negara maupun swasta.

tra sebagai Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Razilu sebagai Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual.

Lalu ada Irjen Pol Reynhard Silitonga sebagai Inspektur Jenderal Kemenkum dan Min Usihin sebagai Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Selain itu, ada beberapa nama baru yang juga dipilih untuk mengisi posisi pimpinan tinggi madya di Kementerian Hukum seperti Widodo sebagai Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Andry Indradry sebagai Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum, dan G.A.P. Swardani sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Prabowo juga menunjuk Wisnu Nugroho Dewanto sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Sosial Kemenkum serta Sucipto sebagai Staf Ahli Bidang Hubungan Antarlembaga dan Penguatan Reformasi Birokrasi Kemenkum.*

Dirinya juga sempat menjadi salah satu panelis dalam debat calon wakil presiden (cawapres) 2024, merumuskan pertanyaan mengenai ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital.

Selama menjabat di Ombudsman, Alamsyah aktif memantau kasus-kasus kontroversial, seperti penanganan perkara ekspor benih lobster, kasus asuransi Jiwasraya, rangkap jabatan komisaris BUMN, hingga penyaluran bantuan sosial Covid-19.*

Wujudkan Masyarakat Sejahtera, Kakanwil Harap Optimalisasi Pengelolaan Zakat



Pewarta: Lisna

SULTRA, BP- Kakanwil Kemenag Prov. Sultra, H. Muhamad Saleh hadir menyampaikan sambutan sekaligus membawakan materi pada kegiatan Harmonisasi Pengelolaan Zakat dan Rapat Koordinasi Daerah (RAKORDA) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) se Sultra Tahun 2024, yang dibuka oleh Pj. Gubernur Sultra diwakili Sekda Sultra, H. Asrun Lio, berlangsung di Hotel Plaza Inn Kendari. Selasa, (12/11/2024).

Hadir, Pimpinan Baznas RI Pembina Wilayah Sultra, Pj. Walikota Kendari diwakili Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Kasatgaswil Densus 88 AT Polri Sultra, Ketua Umum Pengurus Masjid Alkautsar Kendari, Kepala Kantor Kemenag Kab./Kota se Sultra, Ketua Baznas serta Ketua Lembaga Amil Zakat se Sultra, para Pimpinan Ormas Islam.

Kakanwil, H. Muhamad Saleh menyampaikan, Zakat sebagai salah satu rukun Islam, memiliki fungsi yang sangat penting dalam mengentaskan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial. Optimalisasi pengelolaan zakat yang baik dan amanah dapat membantu mencapai keadilan sosial serta memberdayakan masyarakat, khususnya mereka yang berada di garis kemiskinan.

“Rakorda kali ini menjadi momentum strategis bagi kita semua untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam

pengelolaan zakat di tingkat daerah,” ungkapnya.

Menurut Saleh, tantangan dalam pengelolaan zakat sangat dinamis, terutama di tengah perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi saat ini. Oleh karena itu, perlunya untuk terus meningkatkan kapasitas dan inovasi dalam menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan zakat secara efektif dan efisien.

“Kementerian Agama memiliki komitmen untuk mendukung penuh program-program BAZNAS dalam pemberdayaan umat. Kami siap untuk bersinergi dalam setiap upaya untuk memajukan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Muhamad Saleh juga mengapresiasi peran BAZNAS dalam mengoptimalkan pengelolaan zakat di Sultra, sekaligus menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan zakat. Menurutnya, dengan pengelolaan yang amanah, kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS akan semakin meningkat.

“Saya mengajak kita semua untuk berkomitmen, bekerja sama, dan berkontribusi secara optimal. Semoga Allah SWT memberikan kemudahan bagi kita semua dalam mengemban amanah ini dan menjadikan Rakorda ini sebagai sarana untuk menyusun langkah-langkah strategis dalam memajukan umat,” harap Saleh.

Dikeseempatan yang sama, Sekda Prov. Sultra Asrun Lio menyebut, pihaknya menyambut baik kegiatan tersebut dan mengharapkan BAZNAS

dapat merumuskan langkah-langkah strategis dalam mengoptimalkan penghimpunan dan penyaluran zakat serta merencanakan program pemberdayaan masyarakat yang dapat menciptakan perubahan positif dimasa depan.

Dijelaskannya, zakat memiliki kedudukan sangat penting lebih dari sekedar kewajiban agama, tapi juga merupakan instrumen sosial yang dapat mengurangi kemiskinan, memperkecil kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan umat.

“Melalui sinergi pengelolaan zakat inklusif, kita dapat menciptakan sistem pengelolaan zakat yang lebih terstruktur dan berkelanjutan dengan memanfaatkan setiap peluang yang ada, baik dalam menghimpun, pengelolaan maupun pemberdayaan zakat bagi para mustahik untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” tandasnya.

Sebelumnya, Pimpinan Baznas RI Pembina Wilayah Sultra, H. Rizaludin Kurniawan mengatakan, Rakorda ini digelar sebagai tindak lanjut Rakernas beberapa waktu lalu yang salah satu poinnya adalah penguatan BAZNAS sebagai Badan Amil Zakat Negara yang resmi. BAZNAS adalah satu-satunya pengelola zakat nasional yang dalam melaksanakan fungsi pengelolannya, dibantu oleh Badan Amil Zakat Masyarakat.

“Poin lainnya adalah bagaimana pengelolaan zakat bisa dijalankan secara efektif

dan efisien. Serta agar pengelolaan zakat itu memberikan dampak nyata dalam penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

Dikatakannya, zakat harus dikelola secara baik, profesional serta akuntabel, karena selain dilakukan audit internal, juga diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dan Audit Syariah oleh Kemenag.

Dirinya menambahkan, BAZNAS sudah menerapkan prinsip 3 Aman, yakni aman syar’i agar sesuai dengan syariat islam, aman regulasi dan ketiga aman NKRI, dimana keseluruhan himpunan zakat baik pengelolaan dan penyaluran, seutuhnya untuk mewujudkan Indonesia yang adil makmur dan sejahtera.

“Di mana zakat dihimpun, maka di situlah zakat disalurkan bagi para mustahik yang ada di sekitarnya,” pungkasnya.

Dikeseempatan tersebut, Kakanwil Kemenag Prov. Sultra, H. Muhamad Saleh, menyerahkan secara simbolis Bantuan Pemberdayaan Usaha melalui program Z-Mart yang diinisiasi oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sultra, Sekaligus menerima Piagam Penghargaan dari Ketua Baznas Sultra atas partisipasi dalam sesi diskusi bertajuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq melalui Program Kerakyatan pada kegiatan Harmonisasi Pengelolaan Zakat dan RAKORDA BAZNAS se Sultra.*

Wujudkan Masyarakat Sejahtera, Kakanwil Harap Optimalisasi Pengelolaan Zakat



SULTRA, BP- Kakanwil Kemenag Prov. Sultra, H. Muhamad Saleh hadir menyampaikan sambutan sekaligus membawakan materi pada kegiatan Harmonisasi Pengelolaan Zakat dan Rapat Koordinasi Daerah (RAKORDA) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) se Sultra Tahun 2024, yang dibuka oleh Pj. Gubernur Sultra diwakili Sekda Sultra, H. Asrun Lio, berlangsung di Hotel Plaza Inn Kendari. Selasa, (12/11/2024).

Hadir, Pimpinan Baznas RI Pembina Wilayah Sultra, Pj. Walikota Kendari diwakili Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Kasatgaswil Densus 88 AT Polri Sultra, Ketua Umum Pengurus Masjid Alkautsar Kendari, Kepala Kantor Kemenag Kab./Kota se Sultra, Ketua Baznas serta Ketua Lembaga Amil Zakat se Sultra, para Pimpinan Ormas Islam.

Kakanwil, H. Muhamad Saleh menyampaikan, Zakat sebagai salah satu rukun Islam, memiliki fungsi yang sangat penting dalam mengentaskan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial. Optimalisasi pengelolaan zakat yang baik dan amanah dapat membantu mencapai keadilan sosial serta memberdayakan masyarakat, khususnya mereka yang berada di garis kemiskinan.

“Rakorda kali ini menjadi momentum strategis bagi kita semua untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam pengelolaan zakat di tingkat daerah,” ungkapnya.

Menurut Saleh, tantangan dalam pengelolaan zakat sangat dinamis, terutama di tengah perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi saat ini. Oleh karena itu, perlunya untuk terus meningkatkan kapasitas dan inovasi dalam menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan zakat secara efektif dan efisien.

“Kementerian Agama memiliki komitmen untuk mendukung penuh program-program BAZNAS dalam pemberdayaan umat. Kami siap untuk bersinergi dalam setiap upaya untuk memajukan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Muhamad Saleh juga mengapresiasi peran BAZNAS dalam mengoptimalkan pengelolaan zakat di Sultra, sekaligus menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan zakat. Menurutnya, dengan pengelolaan yang amanah, kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS akan semakin meningkat.

“Saya mengajak kita semua untuk berkomitmen, bekerja sama, dan berkontribusi secara optimal. Semoga Allah SWT memberikan kemudahan bagi kita semua dalam mengemban amanah ini dan menjadikan Rakorda ini sebagai sarana untuk menyusun langkah-langkah strategis dalam memajukan umat,” harap Saleh.

Dikeseempatan yang sama, Sekda Prov. Sultra Asrun Lio menyebut, pihaknya menyambut baik kegiatan tersebut dan mengharapkan BAZNAS dapat merumuskan langkah-langkah strategis dalam mengoptimalkan penghimpunan dan penyaluran zakat serta merencanakan program pemberdayaan masyarakat yang dapat menciptakan perubahan positif dimasa depan.

Dijelaskannya, zakat memiliki kedudukan sangat penting lebih dari sekedar kewajiban agama, tapi juga merupakan instrumen sosial yang dapat mengurangi kemiskinan, memperkecil kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan umat.

“Melalui sinergi pengelolaan zakat inklusif, kita dapat menciptakan sistem pengelolaan zakat yang lebih terstruktur dan berkelanjutan dengan memanfaatkan setiap peluang yang ada, baik dalam menghimpun, pengelolaan maupun pemberdayaan zakat bagi para mustahik untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” tandasnya.

Sebelumnya, Pimpinan Baznas RI Pembina Wilayah Sultra, H. Rizaludin Kurniawan mengatakan, Rakorda ini digelar sebagai tindak lanjut Rakernas beberapa waktu lalu yang salah satu poinnya adalah penguatan BAZNAS sebagai Badan Amil Zakat Negara yang resmi. BAZNAS adalah satu-satunya pengelola zakat nasional yang dalam melaksanakan fungsi pengelolannya, dibantu oleh Badan Amil Zakat Masyarakat.

“Poin lainnya adalah bagaimana pengelolaan zakat bisa dijalankan secara efektif dan efisien. Serta agar pengelolaan zakat itu memberikan dampak nyata dalam penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

Dikatakannya, zakat harus dikelola secara baik, profesional serta akuntabel, karena selain dilakukan audit internal, juga diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dan Audit Syariah oleh Kemenag.

Dirinya menambahkan, BAZNAS sudah menerapkan prinsip 3 Aman, yakni aman syar’i agar sesuai dengan syariat islam, aman regulasi dan ketiga aman NKRI, dimana keseluruhan himpunan zakat baik pengelolaan dan penyaluran, seutuhnya untuk mewujudkan Indonesia yang adil makmur dan sejahtera.

“Di mana zakat dihimpun, maka di situlah zakat disalurkan bagi para mustahik yang ada di sekitarnya,” pungkasnya.

Dikeseempatan tersebut, Kakanwil Kemenag Prov. Sultra, H. Muhamad Saleh, menyerahkan secara simbolis Bantuan Pemberdayaan Usaha melalui program Z-Mart yang diinisiasi oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sultra, Sekaligus menerima Piagam Penghargaan dari Ketua Baznas Sultra atas partisipasi dalam sesi diskusi bertajuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq melalui Program Kerakyatan pada kegiatan Harmonisasi Pengelolaan Zakat dan RAKORDA BAZNAS se Sultra.*

Pj Bupati Busel Ridwan Badalla Tiba di Bumi Gajah Mada



Pewarta: Eron

BUSEL, BP-Sehari pasca pelantikan sebagai Pj. Bupati Buton Selatan, Selasa (12/11/2024), DR. M. Ridwan Badallah, S.Pd., MM langsung melaksanakan tugasnya di Batauga, Buton Selatan.

Pada hari Rabu (13/11/2024) pagi, Pj. Bupati Buton Selatan bersama keluarga bertolak dari Kendari ke Batauga, Buton Selatan un-

tuk memulai tugas pemerintahannya, kapal yang ditumpanginya tiba pada siang hari, transit di salah satu hotel di Kota Baubau, selanjutnya dijemput menuju Batauga, ibukota Kabupaten Busel.

Penyambutan orang nomor satu di Bumi Gajah Mada ini disambut warga yang telah menantinya beberapa jam sebelumnya. Penyambutan

di depan Rujab Bupati sederetan siswa SD, SMP di wilayah Lakambau dan Laompo, para Ka. OPD (ASN), PKK, Dharma Wanita, para Kepala Sekolah, PGRI, IGTK, Kades dan perangkatnya, dilanjutkan dengan Rapat Koordinasi bersama seluruh kepala OPD dan Kabag Lingkup Setda, sekaligus perkenalan dengan Pj. Bupati Buton Selatan.

Sesuai instruksi Pj.

Gubernur Sulawesi Tenggara, Komjen Pol. (Purn.) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H., ia harus memastikan pendistribusian logistik pemilu berjalan dengan lancar dan aman. Selain itu, menyiapkan pelaksanaan program pemerintah pusat terkait makan siang bergizi gratis, serta memodernisasi sistem administrasi pemerintahan. (*)

Pemkab Buton Peringati HKN 2024



Pewarta: Rahim

BUTON, BP-Pemerintah Kabupaten Buton melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Buton memperingati Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-60 dengan mengusung tema “Gerak Bersama Se-

hat Bersama” sekaligus dirangkaikan dengan launching Integrasi Layanan Primer (ILP) Puskesmas, Pustu dan posyandu Kabupaten Buton tahun 2024, di Aula Kantor Bupati Buton, Selasa, 12 November 2024

Sekretaris daerah kabupaten Buton, Asnawi Jamaluddin, S.Pd, M.Si mewakili Pj. Bupati Buton dan masyarakat kabupaten Buton mengucapkan selamat Hari Kesehatan Nasional yang ke-60 tahun 2024

“Saya atas nama Pj. Bupati dan masyarakat Kabupaten buton mengucapkan selamat merayakan Hari Kesehatan Nasional yang ke-60 kepada keluarga besar Dinas Kesehatan Kabupaten Buton baik yang bertugas di Dinkes,

Pemkab Buton Gelar Aksi Bergizi di Lapodi



Pewarta: Rahim

BUTON, BP-Pemkab Buton melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Buton menggelar Aksi Bergizi di Desa Lapodi Kecamatan Pasarwajo, Kamis, 12 November 2024.

Aksi bergizi tersebut dalam upaya percepatan penurunan stunting wilayah Kabupaten Buton, melibatkan berbagai pihak termasuk para siswa siswi SMPN 11 Buton, Guru, Kepala Sekolah, Kepala

Kesehatan Kabupaten Buton, Kepala UPTD Puskesmas wilayah Kecamatan Pasarwajo, tenaga kesehatan, PKK Kabupaten Buton dan Dharma Wanita Kabupaten Buton, Kepala Desa dan Camat.

Kegiatan aksi bergizi dirangkaikan dengan pemberian tablet penambah darah, dan pemeriksaan kesehatan gratis.

Pj. Bupati Buton yang diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda

Buton, Nanang La Kaungge, SKM, MSI menyampaikan bahwa dalam penurunan angka stunting perlu dibutuhkan dukungan dan kerjasama semua pihak yang dikemas dalam bentuk kampanye dan gerakan aksi bergizi.

Selain itu, saat ini dinas kesehatan menggagas inovasi aksi strategis pelayanan integrasi sekolah atau lebih dikenal dengan “Asyik School” bekerjasama dengan dinas pendidikan. (*)

Asnawi Jamaluddin Tekankan Pentingnya Peran Pemdes

Pewarta: Rahim

BUTON, BP-Sekretaris Daerah Kabupaten Buton, Asnawi Jamaluddin, SPd, MSI menekankan pentingnya peran pemerintah desa sebagai ujung tombak pembangunan dan pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.

“Saya anggap penting karena ini ada kaitannya dengan bagaimana perencanaan program desa sehingga di tahun 2025 para kepala desa telah siap bekerja tidak ada lagi namanya keterlambatan,” kata Sekda ketika membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pembinaan Pemerintahan dan Pembangunan Desa se-Kabupaten Buton yang digelar di

Aula Kantor Bupati Buton, Kamis, 7 November 2024.

Rakor ini dihadiri oleh Kepala Inspektorat Kabupaten Buton, Kepala Dinas PMD, Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat, perwakilan dari seluruh Desa di Kabupaten Buton, serta sejumlah kepala OPD, Camat, dan tokoh masyarakat.

Sekda lebih lanjut mengatakan para stakeholder untuk menyinergikan program pembangunan antara pemerintah kabupaten dengan pemerintahan desa, sehingga tercipta arah pembangunan yang sejalan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa di Kabupaten Buton.

Rakor tersebut juga

membahas sejumlah isu penting terkait tata kelola pemerintahan desa, pengelolaan dana desa, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa. Diharapkan, hasil dari rakor ini akan menjadi panduan dan motivasi bagi seluruh kepala desa dan perangkat desa untuk bekerja lebih baik dalam melayani masyarakat.

Kegiatan ini ditutup dengan sesi diskusi interaktif antara peserta rakor dan narasumber dari berbagai OPD, yang memberikan kesempatan bagi para kepala desa untuk menyampaikan aspirasi serta tantangan yang mereka hadapi dalam pelaksanaan pembangunan desa. (*)

RS, lab kesehatan, gudang farmasi, puskesmas, pustu dan posyandu,” ucap Sekda Buton mengawali sambutannya pada Puncak Peringatan HKN 2024 tingkat Kabupaten Buton.

Sekda mengatakan program ILP hari ini

telah di launching di masing-masing 3 puskesmas, pustu dan posyandu yaitu di UPTD puskesmas banabungi, puskesmas Wajajaya, Pustu Dongkala, Pustu Siomanuru dan Posyandu Cakalang, posyandu Permata

Bunda dan posyandu Siomanuru

“Saya berharap peringatan HKN yang ke-60 ini semakin memperkuat komitmen kita untuk bergerak bersama membangun budaya sehat untuk indonesia emas 2045,” pungkasnya. (*)

Tindakan Nyata adalah Kunci Menghadapi Tantangan Kesehatan



Laporan: Husni

JAKARTA-Wakil Menteri Kesehatan RI Prof. Dante Saksono Harbuwono menghadiri acara puncak Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-60 tingkat Provinsi DKI Jakarta dengan tema "Gerak Bersama, Jakarta Berdaya" di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan pada Senin (11/11/2024).

Dalam sambutannya, Prof. Dante mengatakan, peringatan HKN bukan sekadar seremonial, tetapi pengingat bagi seluruh masyarakat untuk terus bekerja sama dan bertindak nyata, karena hal itu merupakan kunci untuk menghadapi berbagai tantangan kesehatan.

Berkaca dari sejarah keberhasilan Indonesia melawan Malaria pada 1964, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memulai program pemberantasan malaria dengan penyempotan DDT secara besar-besaran di seluruh Nusantara dan mencapai puncak pada 12 November 1964.

"Mari kita jadikan momentum ini untuk memperkuat komitmen bersama dalam

meningkatkan dan memperkuat sistem kesehatan nasional," kata Prof. Dante.

Prof. Dante melanjutkan, saat ini dunia kesehatan menghadapi banyak tantangan yang makin kompleks dan beragam, mulai dari penyakit menular seperti TBC, penyakit tidak menular, serta permasalahan akses layanan kesehatan.

"Ini menuntut kita memiliki sistem layanan rujukan yang efisien, agar pasien mendapatkan penanganan lanjutan yang tepat di fasilitas kesehatan yang sesuai dengan kebutuhannya," lanjut Prof. Dante.

Dalam peringatan puncak HKN ke-60 tingkat provinsi, DKI Jakarta juga meluncurkan sebuah sistem pelayanan kesehatan, yaitu "JAKCONNECTED". Ini merupakan sebuah sistem yang dapat menghubungkan seluruh fasilitas pelayanan di wilayah DKI Jakarta untuk mempermudah rujukan pasien.

Prof. Dante sangat mengapresiasi Dinas Kesehatan DKI Jakarta, termasuk di kota-kota administrasinya, atas usaha dan penerapan

teknologi informasi melalui JakConnect-ed.

"Namun, teknologi saja tidak cukup, butuh tenaga kesehatan terlatih, pemahaman masyarakat, serta sinergi dari seluruh pihak terkait untuk ikut serta dalam menyelesaikan sistem JAKCONNECTED tersebut," kata dia.

Beberapa penghargaan juga diberikan kepada wilayah dan perkampungan yang menjadi contoh teladan dari komitmen kolektif masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, di antaranya Kampung Siaga TBC, Kampung Bebas Jentik, dan Kampung Bebas Asap Rokok.

Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Dr. H. Marullah Matali, dalam sambutannya, menyampaikan, salah satu aspek penting dalam mewujudkan Jakarta Kota Global adalah mempersiapkan sumber daya manusia yang sehat, produktif, dan berdaya saing, dengan mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menerapkan gaya hidup yang lebih sehat dan produktif.

"Terima kasih ke-

pada para Wali Kota, Camat, dan Lurah atas peran aktif dalam pengendalian berbagai penyakit menular berbasis komunitas. Saya ucapkan selamat kepada para kampung penerima penghargaan," kata Dr. H. Marullah Matali.

"Kami mengajak seluruh elemen masyarakat, baik dari kalangan pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat luas, untuk ber-sama-sama terlibat dalam menciptakan gerakan hidup sehat yang mencakup pemeriksaan kesehatan rutin, berolahraga 30 menit setiap hari, menjaga pola makan sehat, serta kebersihan lingkungan sekitar," ujar Dr. H. Marullah.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berkomitmen untuk bersinergi dengan Pemerintah Pusat dan berbagai elemen masyarakat dalam memfasilitasi kebutuhan sektor kesehatan, baik dalam operasional maupun pengembangan layanan.

"Bersama kita terapkan gaya hidup masyarakat Jakarta yang lebih sehat dan produktif," kata Dr. H. Marullah menutup sambutannya. (*)

Menkes Tegaskan Indonesia Serius Tangani TBC



BALI-Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa Indonesia sangat serius dalam mengatasi TBC. Sebab, TBC merupakan penyakit menular yang sangat mematikan, bahkan lebih mematikan dibandingkan COVID-19.

"Ketika belajar tentang TBC saya sangat terkejut, karena sampai saat ini TBC telah membunuh lebih dari 1 milyar orang di dunia. Artinya, TBC membunuh lebih banyak orang dibanding COVID-19," kata Menkes saat menghadiri Welcome Greeting The Union World Conference on Lung Health di Hotel The Westin, Bali pada Selasa (12/11) malam.

Di Indonesia, angka kematian akibat TBC mencapai 136 ribu orang setiap tahunnya, yang berarti setiap 5 menit ada 1 orang meninggal karena TBC.

Sementara itu, kasus TBC di Indonesia diestimasikan mencapai 1 juta kasus. Namun, ketika dirinya menjadi Menteri Kesehatan di tahun 2020 lalu, baru 400 ribu kasus yang teridentifikasi.

Menkes mengatakan deteksi TBC mirip dengan deteksi Covid-19, yakni jika tidak dites, dideteksi, dan dilaporkan maka angkanya terlihat rendah sehingga terjadi under

reporting, yang mengakibatkan pengidap TBC berkeliaran dan berpotensi menular karena tidak diobati.

Komitmen Indonesia dalam mengatasi tuberkulosis (TBC) dibuktikan dengan memperbaiki sistem deteksi dan pelaporan sehingga tercapai notifikasi kasus tertinggi sepanjang sejarah sejak tahun 2022.

Dari estimasi satu juta kasus TBC di Indonesia, ada peningkatan temuan kasus yang sangat signifikan, dimana 724.309 kasus ditemukan di tahun 2022. Temuan kasus terus meningkat di tahun 2023 sebanyak 821.200 kasus. Dan sampai September tahun ini saja sudah 627.797 kasus yang teridentifikasi.

Menkes menargetkan di tahun 2025 sebanyak 1.035.000 kasus TBC dapat dideteksi.

Menkes mengatakan, selain meningkatkan temuan kasus, pemerintah juga mengembangkan terapi pengobatan dan menginisiasi pemakaian vaksin TBC.

"Itu kenapa Indonesia sangat agresif dalam mendorong regimen baru yang dapat mengurangi waktu treatment menjadi lebih cepat, lebih mudah dikunyah dan tidak menimbulkan efek samping," ungkap Menkes.

Peningkatan temuan kasus juga dibarengi dengan terus meningkatnya kasus yang diobati. Di tahun 2021 sebanyak 403 ribu kasus TBC yang diobati, meningkat tajam pada tahun 2022 menjadi sebanyak 635 ribu, dan pada tahun 2023 sebanyak 722 ribu. Sampai September di tahun ini yang diobati sudah sebanyak 539 ribu kasus.

Menkes mengatakan, Indonesia juga sangat agresif dalam memfasilitasi uji klinis untuk vaksin baru TBC. Dia berharap, vaksin TBC dapat diluncurkan pada 2029.

Menkes berharap pertemuan ini dapat menjadi sarana untuk membantu Indonesia dan dunia dalam mengatasi TBC yang telah membunuh jutaan penduduk di seluruh dunia.

Presiden The Union, Guy Marks, mengapresiasi dukungan pemerintah Indonesia dalam sukseskan World Conference yang digelar di Hotel The Westin, Bali, pada 12-16 November 2024. Dia juga menggarisbawahi keseriusan Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam eradikasi TBC.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada Indonesia dan Menteri Kesehatan Budi yang telah menjadi partner kerja sama yang solid dalam melawan TBC," kata Guy. (lisna)

Harian Pagi

Baubau Post

Kritik, Lugas, Independen

Wartawan Baubau Post tidak menerima imbalan dalam bentuk apa pun saat melakukan tugas jurnalistik

Dalam pelaksanaan tugas, wartawan Baubau Post dibekali tanda pengenal. Untuk itu masyarakat yang mencurigai seseorang yang mengatasnamakan Baubau Post, segera menghubungi Kantor Redaksi Surat Kabar Baubau Post

Segala Berita yang diterbitkan oleh Baubau Post merupakan tanggungjawab penanggungjawab Redaksi

Pemimpin Umum : Fauzan NWA
Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi : Ardi
Redpel : Hengky TA
Korlip : Hengky T.A
Redaktur : Alyakin, Kasrun
Reporter : Rahim, Mashuri, Jaya, Azis, Lisna

Layouter : Rlirin
Pracetak : Aditya
Cetak : Jamal

Penerbit : PT. Faren Grafika
Komisaris : Erna Agule
Direktur Utama : Andina Latief, SKM
Manager Keuangan : Nabila D.A
Manager Iklan dan Pemasaran : Fauzan
Kepala Sirkulasi : Jamal
Administrasi : Salvana
Security :

Alamat Redaksi/ Tata Usaha : Jl. Raya Palagimata, BTN Palagimata, Blok K-L No. 1 Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari Kota Baubau
Tlp. 0402-2814207 - Email : baubaupost2019@gmail.com
Percetakan : PT. Faren Grafika, Alamat: Jl. Raya Palagimata Blok K No 01, Kel. Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau

Kepala Biro Wakatobi : Risman
Kepala Biro Buton Utara : Fauzan
Kepala Biro Buton : Rahman
Kepala Biro Busel : Salvana
Kepala Biro Buteng : Andini
Kepala Biro Bombana : -
Kepala Biro Sultra : -

Kontributor Baubau : Iphul, Kontributor Sultra : Amat Jr
Kontributor Buton : Kontributor Butur : Kasrun,
Kontributor Buteng : Hengki TA, Kontributor Busel : Amirul

Baubau : Jaya
Agen Pasarwajo : -
Agen Butur : Samrihan

Harga Langgan : Dalam Kota Baubau Rp. 100.000,-/ bulan,
 Luar Kota Baubau + Ongkos Kirim,
 Eceran Dalam Kota Baubau : Rp.5.000,-

KPK Dalami Dugaan Keterlibatan David Glen di Kasus TPPU Abdul Gani



Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan keterlibatan Komisaris Utama PT Mineral Trobos, David Glen Oei (DGO) dalam kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menyeret Gubernur Maluku Utara nonaktif, Abdul Gani Kasuba (AGK).

Laporan: Hamid

JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan keterlibatan Komisaris Utama PT Mineral Trobos, David Glen Oei (DGO) dalam kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menyeret mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba (AGK).

David Glen sudah pernah diperiksa KPK sebagai saksi pada Selasa, 8 Oktober 2024.

"Sementara didalam," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika saat dihubungi wartawan pada Jumat, (15/11)

Kata dia, tidak menutup kemungkinan Penyidik KPK akan kembali meminta keterangan terhadap saksi David Glen terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang Abdul Gani. Namun, Tessa mengaku belum mendapat informasi lebih lanjut dari penyidik terkait jadwal pemeriksaan terhadap saksi tersebut.

"Masih menunggu update dari penyidiknya (untuk dipanggil kembali David Glen)," ujarnya.

Diketahui, Komisaris Utama PT Mineral Trobos, David Glen Oei telah memenuhi panggilan Penyidik KPK untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menyeret Gubernur Maluku Utara nonaktif, Abdul Gani Kasuba di Gedung KPK pada Selasa, 8 Oktober 2024. Usai diperiksa, David Glen bungkam.

"Saksi didalami terkait dengan kepemilikan aset tersangka AGK," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika kepada wartawan Selasa, 8 Oktober 2024.

Diketahui, ada puluhan perusahaan dari 57 blok tambang yang izinnnya diloloskan oleh Eks Ketua DPD Gerindra Maluku Utara, Muhaimin Syarif. Hal itu terungkap lewat persidangan Muhaimin Syarif.

Sementara Direktur Penyidikan KPK,

Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa Muhaimin Syarif memang mengurus sejumlah perusahaan untuk diloloskan di wilayah Maluku Utara. Muhaimin Syarif bisa meloloskan sejumlah perusahaan tersebut karena kongkalikong dengan Abdul Gani Kasuba.

"Muhaimin Syarif ini memang mengurus beberapa orang," ujar Asep Guntur.

Asep menuturkan, jika ada pihak yang ingin mengurus izin perusahaan terutama di bidang tambang bisa diurus dengan mulus oleh MS. Termasuk diduga sejumlah perusahaan milik David Glen.

"Memang perusahaannya bukan punya intinya bukan milik dia aja (David Glen). Ada yang miliknya dia (MS) ada yang miliknya David," ungkapnya.

Sementara Pegawai Kementerian ESDM, Cecep dalam keterangannya sebagai saksi di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate menyebut ada ratu-

san WIUP atau blok tambang yang diurus terdakwa Muhaimin Syarif bersama dua Kepala Dinas di Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Berdasarkan rekapan data yang dikantongi Kementerian ESDM, kata Cecep, mulai dari tahun 2021 itu sebanyak 107 usulan WUP yang diurus dan ada empat blok tambang yang disetujui.

"107 usulan penetapan WIUP, beberapa usulan sudah ada PT-nya. Kalau dalam aturan itu tidak ada penyebutan nama PT. Oleh karena itu, di tahun 2022, kita sampaikan rekapan WIUP dari Gubernur Maluku Utara itu ada catatan yaitu saling tumpang tindih," kata Cecep pada Kamis, 14 November 2024.

Seingat Cecep, sejumlah WUP yang disetujui adalah Blok Marimoi, Lelilef Sawi, Fpli dan Kaf. Keempat itu sudah diterbitkan dan sudah pada WUP eskplorasi dengan jangka waktu 8 tahun. (*)

"Tulisan ini adalah ungkapan rasa sayang kepada pimpinan sebagai Ayah kami. Ini bukan tulisan minta naik tunjangan dan gaji. Apa yang diberikan negara alhamdulillah cukup bagi

Kejagung Respons Desakan DPR Periksa Mendag Lain di Kasus Impor Gula

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) angkat suara terkait desakan sejumlah anggota Komisi III DPR yang meminta agar para Menteri Perdagangan (Mendag) lain juga diperiksa terkait kasus penyelewengan izin impor gula.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Harli Siregar menyebut peluang pemeriksaan terhadap mantan Menteri Perdagangan lainnya tergantung bukti-bukti permulaan yang ditemukan oleh penyidik.

"Iya (pemeriksaan mantan Menteri Perdagangan lain) semua berpulang kepada bukti-bukti yang ada," ujarnya kepada wartawan di Kejagung, Jumat (15/11).

Di sisi lain, Harli mengatakan saat ini penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus masih berfokus mengusut dugaan korupsi yang terjadi pada periode kepemimpinan Tom Lembong.

Kendati demikian, ia memastikan tidak menutup peluang pemeriksaan juga akan di-

lakukan terhadap eks menteri lainnya seperti yang diminta oleh anggota DPR.

"Penyidikan itu harus fokus terhadap satu perkara, begitu. Apakah misalnya ada pihak-pihak lain yang media selalu pertanyakan, nanti kita lihat perkembangannya," katanya.

Sebelumnya sejumlah anggota Komisi III DPR ramai-ramai mencecar Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin terkait kasus impor gula yang menjerat eks Menteri Perdagangan Tom Lembong, Rabu (13/11).

Mereka kompak meminta penjelasan Jaksa Agung terkait penetapan Tom Lembong sebagai tersangka. Para anggota mengendus kegagalan dalam kasus tersebut.

"Saya ingin menyampaikan penetapan tersangka kasus dugaan korupsi impor gula mantan menteri perdagangan Tomas Trikasih Lembong atau dikenal dengan Tom Lembong," kata anggota Komisi III DPR, Muhammad Rahul dari Fraksi Gerindra.

Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong dan eks Direktur PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) berinisial CS sebagai tersangka dalam kasus korupsi penyalahgunaan wewenang impor gula.

Tom Lembong dinilai menyalahgunakan wewenangnya sebagai Menteri Perdagangan dengan mengeluarkan izin Persetujuan Impor (PI) dengan dalih pemenuhan stok gula nasional dan stabilisasi harga gula nasional meskipun Indonesia sedang surplus gula.

Tom Lembong juga diduga melakukan perbuatan melawan hukum dengan menerbitkan persetujuan impor gula kristal mentah (GKM) untuk diolah menjadi gula kristal putih (GKP) kepada pihak-pihak yang tidak berwenang.

Dalam kasus ini, Kejagung menyebut nilai kerugian negara akibat perbuatan importasi gula yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mencapai Rp400 miliar. (Hamid)

kami. Kami hanya merindukan sosok 'AYAH' yang berani dan tegas dalam menegakkan hukum," kata dia dalam e-mail internal yang diperoleh CNNIndonesia.com.

Pegawai itu berharap pimpinan KPK dapat dengan bijaksana memahami keresahan semua pegawai yang masih peduli terhadap KPK.

Ia juga berharap para pemimpin dan pengambil kebijakan di KPK bisa menegakkan keadilan dengan seadil-adilnya tanpa kepentingan pragmatis pribadi.

Salah satu pegawai KPK baru-baru ini menuangkan keresahannya lewat e-mail internal menyikapi kekalahan KPK melawan Paman Birin.

Menurut dia, ada faktor non-teknis di level kebijakan yang membuat KPK harus menghormati putusan praperadilan yang memenangkan sang mantan Gubernur.

"Melihat berita di bawah terkait dengan putusan Paman Birin dan kritik-kritik

pengamat setelahnya membuat hati ini sungguh miris dan sedih," tuturnya.

"Saya yakin hal yang terjadi sesungguhnya atas kekalahan ini bukanlah karena keteladanan teknis atau ketidakprofesionalan penyidik melainkan ada faktor 'non teknis' pada level 'kebijakan,'" ucapnya.

Pegawai itu berujar terlalu banyak 'bisik-bisik' di grup pegawai dan celoteh di belakang terkait dengan 'ketidakprofesionalan' dalam 'menangani' sebuah perkara di periode pimpinan KPK saat ini.

KPK Atur Pemeriksaan Paman Birin Sebagai Saksi Kasus Suap "Aroma 'tebang pilih' atau 'memilih-milih' terasa sangat kental dan kentara. Ini pulalah yang kemudian membuat masyarakat di luar meneriakkan kritik-kritik yang sangat-sangat tajam ke KPK bahkan teriakan itu sudah sampai pada tahap permintaan untuk pembubaran," ujar dia.

Pegawai itu me-

nurkan di periode kepemimpinan saat ini, sangat sulit mencari penangkal untuk merespons kritik di banyak media.

Hal itu tak lain karena kasus di internal mulai dari dugaan korupsi mantan Ketua KPK Firli Bahuri, kasus dugaan pemerasan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) KPK, kasus perjalanan dinas, hingga pelanggaran etik pimpinan.

"KPK yang dulu dibanggakan, sekarang pada titik kepercayaan yang rendah di mata masyarakat," imbuh dia.

Ia pun mempertanyakan sampai kapan kondisi tersebut akan dibiarkan. Dia menekankan masih banyak orang-orang di tubuh KPK yang tulus dan sungguh-sungguh dalam bekerja.

"Apakah sudah tak ada lagi kebanggaan bekerja di institusi ini? Institusi yang dalam sejarahnya berani menyentuh semua oknum koruptor pada semua level-level tinggi eksekutif, yudikatif dan legislatif bahkan pernah berani menyentuh besan presiden," ucapnya. (*)

Alasan Pegawai KPK Resah usai Kalah dari Eks Gubernur Kalsel

JAKARTA- Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bidang penindakan membeberkan alasan memutuskan mencurahkan keresahan melalui surat elektron-

ik atau e-mail internal setelah KPK kalah melawan mantan Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor.

Pegawai yang enggan disebut identitasnya itu mengatakan

sudah lama e-mail internal tak diisi saran dan masukan kepada pimpinan. Ia merasa nuansa egaliter telah hilang dalam ruang komunikasi lembaga antirasuah tersebut.

"Tulisan ini adalah ungkapan rasa sayang kepada pimpinan sebagai Ayah kami. Ini bukan tulisan minta naik tunjangan dan gaji. Apa yang diberikan negara alhamdulillah cukup bagi

1



CALON BUPATI
SYARASWATI

CALON WAKIL BUPATI
Drs. H. RASYID
MANGURA, M.H.

PASANGAN CALON PERSEORANGAN

VISI

MEWUJUDKAN KABUPATEN BUTON YANG MANDIRI, MAJU, DAN BERDAYA SAING MELALUI OPTIMALISASI PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKELANJUTAN UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

MISI

1. MENINGKATKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKELANJUTAN DAN BERDAYA SAING.
2. MENDORONG PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG MENDUKUNG PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM.
3. MEMAJUKAN SEKTOR PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN DENGAN TEKNOLOGI MODERN.
4. MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL.
5. MENOPTIMALKAN PARAWISATA BERBASIS SUMBER DAYA ALAM DAN BUDAYA LOKAL.
6. MEMPERKUAT TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG TRANSPARAN DAN PARTISIPATIF.

2



CALON BUPATI
Drs. LA BAKRY, M.Si.

CALON WAKIL BUPATI
ARIS MARWAN SAPUTRA,
S.H.

GABUNGAN PARTAI POLITIK PENGUSUL



VISI

BUTON SEBAGAI KAWASAN BISNIS DAN BUDAYA TERDEPAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045

MISI

1. PENGEMBANGAN SUMBER DAYA ALAM (SDA) SAINS, TEKNOLOGI DAN TATA RUANG KAWASAN.
2. TRANSFORMASI PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM).
3. KESETARAAN GENDER, PEMULA (GENERASI MILENIAL DAN GENERASI Z) DAN PENYANDANG DISABILITAS.
4. PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR, UMKM DAN INDUSTRI KREATIF.
5. REFORMASI BIROKRASI, KESADARAN HUKUM DAN TRANSPORTASI KEBUAKAN PEMERINTAH DAERAH.
6. PERKUAT PENYELARASAN HUBUNGAN SOSIAL KEMASYARAKATAN DAN PELESTARIAN BUDAYA.

3



CALON BUPATI
H. LA ODE NAANE

CALON WAKIL BUPATI
H. AKALIM, S.Pd.

GABUNGAN PARTAI POLITIK PENGUSUL



VISI

TERWUJUDNYA BUTON SEBAGAI RUMAH BERSAMA YANG CERDAS, SEJAHTERA, BERDAYA SAING, MENGHARGAI PERBEDAAN DAN MEMILIKI JIWA GITONG ROYONG

MISI

1. MENCIPTAKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNANCE, DENGAN DUKUNGAN TEKNOLOGI SERTA PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING BAGI MASYARAKAT BUTON SMART.
2. MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI PELAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN YANG BERKUALITAS DAN TERJANGKAU MENUJU GENERASI BUTON EMAS.
3. MEMBANGUN EKONOMI YANG KREATIF DAN INOVATIF UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN.
4. MEMBANGUN SARANA DAN PRASARANA YANG MEMADAI UNTUK MENDUKUNG TERWUJUDNYA KABUPATEN BUTON YANG CERDAS (BUTON SMART CITY).
5. MENGUATKAN BUDAYA MASYARAKAT YANG SALING MENGHARGAI DAN JIWA GOTONG ROYONG.

4



CALON BUPATI
Drs. BASIRAN, M.Si.

CALON WAKIL BUPATI
LA ODE RAFIUN, S.Pd.,
M.Si.

PARTAI POLITIK PENGUSUL



VISI

BUTON MAJU, TERCIPTANYA MASYARAKAT BUTON YANG ADIL DAN MAKMUR DI TAMBAI DENGAN MENINGKATNYA DERAJAT PENDIDIKAN DAN KESEHATAN SERTA KONDISI EKONOMI MASYARAKAT LEBIH BAIK. BUTON BERDAYA SAING, MASYARAKAT BUTON YANG MERELIKI KELINGGULAN KOMPETITIF UNTUK MENGHADAPI PERSAINGAN DI MASA YANG AKAN DATANG MENUJU INDONESIA EMAS 2045-2049

MISI

1. MENCIPTAKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DENGAN DUKUNGAN TEKNOLOGI UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT
2. MENINGKATKAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA MELALUI PELAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN YANG BERKUALITAS DAN MUDA SERTA TERJANGKAU.
3. MEMBANGUN EKONOMI YANG KREATIF DAN INOVATIF DENGAN PERTIMBANGAN DAYA SERAP TENAGA KERJA PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN.
4. MENINGKATKAN KETAHANAN MASYARAKAT DALAM MENGHADAPI BERBAGAI MACAM ANCAMAN DAN GANGGUAN BERLANDASKAN NILAI NILAI FALSAFAH DAN BUDAYA KEBUTONAN DENGAN MENUNJUNG TINGGI NORWA KEAGAMAAN.
5. MEMBANGUN SARANA DAN PRASARANA DASAR YANG PRIORITAS UNTUK MENDUKUNG TERWUJUDNYA DAERAH MAJU BAIK KUANTITAS MAUPUN KUALITAS.
6. MENIMPLEMENTASIKAN ADAT ISTADAT DAN KEBUDAYAAN DAERAH DALAM MENAKIKAN KARASITAS DAERAH.

5



CALON BUPATI
Dr. BERE ALI, M.Si.

CALON WAKIL BUPATI
LAODE MUHAMAD
SUMARLIN BUCHARI, S.E.

GABUNGAN PARTAI POLITIK PENGUSUL



VISI

BERLIAN MEWUJUDKAN BUTON YANG LEBIH BAIK

MISI

1. PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA SEBAGAI MODAL UTAMA PEMBANGUNAN.
2. PENUMBUHAN INVESTASI SEBAGAI SARANA PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA.
3. PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT.
4. PENINGKATAN INFRASTRUKTUR SECARA MERATA.
5. PELAYANAN PUBLIK YANG SEMAKIN EFEKTIF DAN EFISIEN.

6



CALON BUPATI
ALVIN AKAWIJAYA
PUTRA, S.H.

CALON WAKIL BUPATI
SYARIFUDIN SAAFA, S.T.

GABUNGAN PARTAI POLITIK PENGUSUL



VISI

TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG RELIGIUS, SEJAHTERA, MANDIRI DAN BERDAYA SAING MELALUI PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN (BUTON BERSINAR MAS)

MISI

1. MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE), SERTA MENDORONG TERCIPTANYA KEHIDUPAN BERMASYARAKAT YANG RELIGIUS, KONDusif DAN BERBUDAYA.
2. MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA, PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKELANJUTAN DAN MENJAGA LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKUALITAS.
3. MENINGKATKAN KEMANDIRIAN EKONOMI DAERAH YANG BERBASIS POTENSI LOKAL, MEMBUKA LAPANGAN KERJA DAN KESEMPATAN BERUSAHA SERTA MENGURANGI KEMISKINAN.